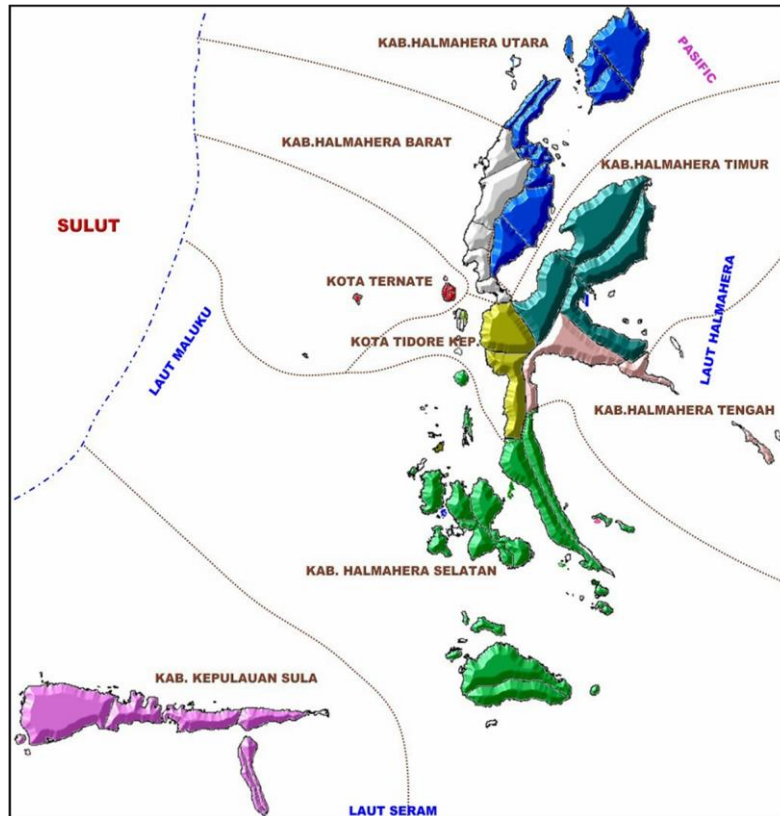




# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU UTARA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renja perangkat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun . Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah , Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) , sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah . Renja perangkat daerah disusun oleh masing – masing satuan perangkat daerah secara terpadu , Partisipatif , dan Demokratis . Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota dan sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja perangkat daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu – isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan perangkat daerah . Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja perangkat daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan , mengimplementasikan , mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah .

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Perangkat daerah adalah:

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengendalian Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan daerah;
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
6. Permendagri no 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah no 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam negeri 050 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
10. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 81 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.
11. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5.1317 tahun 2023, tentang Keputusan Menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 Perubahan hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
12. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 10 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja adalah :

1. merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2026, memastikan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
2. dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
3. Dokumen Renja memastikan adanya kesinkronan dan sinergi antar program , kegiatan, lokasi kegiatan, sasaran dan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi yaitu RKPD dan RENSTRA;
4. Dokumen renja bertujuan untuk mewujudkan target kinerja tahunan perangkat daerah dan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.
5. Renja Juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta sebagai alat pengawasan untuk mempermudah operasional perangkat daerah;
6. Dokumen renja disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan dan alokasi dan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut, sehingga sesuai dengan kebutuhan riil.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap tentang Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahaan usulan program Kegiatan Prioritas

## Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## Bab IV Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah.

Dari hasil pelaksanaan renja tahun lalu ada beberapa target yang belum mencapai target, misalnya untuk kabupaten kota layak anak yang di targetkan pada tahun 2024 sebesar 10 kabupaten atau 100 % , tetapi realisasi hanya 3 kabupaten atau 60 %, yaitu, kota Ternate, Kota Tidore dan Halmahera Barat.

Untuk rasio kekerasan perempuan di tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 26,23 dan meningkat di tahun 2024, sebesar 26,69. Dan untuk data jumlah kekerasan perempuan di tahun 2023 sebanyak 169 kasus dan tahun 2024 sebanyak 172 kasus.

Untuk rasio kekerasan anak tahun 2023 mengalami kenaikan diangka 4,53 dan di tahun 2024 sebesar 5,50 dan untuk data kekerasan anak tahun 2023 sebanyak 237 kasus dan di tahun 2024 sebanyak 274 kasus.

Sementara untuk capaian Tahun 2024 ada peningkatan Indeks Pembangunan Gender sebesar 90,91 % hal ini berarti ada peningkatan dan perubahan dalam dunia Pendidikan, Kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat walaupun sebenarnya masih berada jauh di bawah standar Nasional sebesar 91,85 dan Dinas masih harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender ini. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Tahun 2023 sebesar 52,81 % dan meningkat lagi di Tahun 2024 sebesar 55,41% hal ini menggambarkan bahwa partisipasi perempuan dalam kesempatan kerja lebih baik.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Provinsi Maluku Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase implementasi perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang tersedia	10	10	0	0		5	15	1.5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen perencanaan yang disusun (RKA)	10	10	0	0		1	11	1.1
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	1	100	3	4	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan</b>	100	100	100	100	100	100	300	3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	40	40	40	40	100	60	140	3.5
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1	1	100	1	3	3
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Kepegawaian Perangkat daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100	100	102	102

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ASN	1	1	0	0		0	1	1
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	0	0		0	1	1
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10	10	1	1	100	1	12	1.2
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	50	50	100	20	71	71
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	40	40	100	40	81	81

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	4	0	0	1	2	2
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	1	1	100	0	2	2
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	1	1	100	1	12	1.2
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100	100	102	102
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	0	0		0	1	1
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1	0	0	1	2	2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Paket	1 Paket	0	0		0		

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	12 Bln	1	1	100	1		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln	12 Bln	1	1	100	1		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bln	12 Bln	1	1	100	1		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	3	3

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny	12 Bln	12 Bln	10	4	4	3		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2	100	1	3	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Tingkat pertumbuhan wirausaha perempuan (persen)	10	10	10	10	100		20	2
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	Persentase Kab/kota melaksanakan PPRG	60	60	60	60	100		120	2
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi			1	1	100	1	2	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1	1	4	4	100	0	5	5
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi						40	40	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	100	100	100	100	100	100	300	3

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1	1	30	30	100	40	71	71
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam Polhuksosek	1	1	0	0		1	2	2
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100	100	100	100	100	100	300	3

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	100	100	0	0		0	100	1
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	100	100	20	20	100	0	120	1.2
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan pengembangan sistem pendukung layanan pemberdayaan perempuan (persen)	100	100	0	0		0	100	1
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)</b>	16.9	16.9	16.9	16.9	100		33.8	2

	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penurunan rasio perempuan korban kekerasan (poin)	1,0	1,0	1,0	1,0				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi(Persen)	100	100	0	0		0	100	1
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan Kebijakan dan Pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi(Persen)	100	100	0	0		0	100	1
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentasi kasus rujukan lanjutan perempuan korban kekerasan yang terlayani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	300	3

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	0		50	150	1.5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100	100	50	50	100	50	200	2
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Kabupaten/kota memiliki lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	100		4	2

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	100	30	30	100	20	150	1.5
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						1	1	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	0		1	101	1.01

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Cakupan Program Peningkatan Keluarga</b>	100	100	100	100	100	100	300	3
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah aktifis PATBM yang memperoleh fasilitasi penguatan	40	40	40	40	100	40	120	3
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	100	100	20	20	100	25	145	1.45
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Cakupan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Provinsi	100	100	0	0		100	200	2

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	100	100	1	1	1	1	102	1.02
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG hak Anak Kewenangan Provinsi	100	100	100	100	100	100	300	3
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	100	100	0	0		10	110	1.1
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	100	20	20	100	0	120	1.2

	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Cakupan penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	100	100	0	0		0	100	1
	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	100	100	0	0		0	100	1
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	100	100	0	0		0	100	1
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Cakupan penyediaan sistem data gender dan anak	100	100	100	100	100	100	300	3

	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (persen)	100	100	100	100	100	100	300	3
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	100	100	1	1	100	1	102	1.02
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Cakupan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	100	100	0	0		0	100	1
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	100		16	2
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	Cakupan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintahan, non pemerintah, dan Dunia Usaha	100	100	100	100	100	100	300	3

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Peningkatan SDM tenaga kesehatan bagi puskesmas ramah anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0		0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1	1	100	1		
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	Penambahan jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	2	2	2	2	100	1	5	2.5
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	100	100	50	50	100	50	200	2

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan Layanan Peningkatana Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	100	100	100	100	100	0	200	2
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan Forum Anak Daerah (persen)	100	100	100	100	100	0	200	2
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasamaantar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	1	1	100	1	102	1.02
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak			1	1	100	1	2	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)</b>							0	

	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Penurunan rasio anak korban kekerasan (poin)	0,27	0,27	0,27	0,27				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi advokasi kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di kabupaten/kota (persen)	100	100	30	30	100	100	230	2.3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	100	100	1	1	100	1	102	1.02
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah tenaga pendamping ABK yang diperkuat (orang)	40	40	40	40	100	40	120	3

	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100	100	0	0		0	100	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	100	100	10	10	100	10	120	1.2
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100	100	0	0		100	200	2
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan tenaga pendamping Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (persen)	100	100	0	0		100	200	2

	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	300	3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100	100	0	0,27		100		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	100	100	0	0		100	200	2

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			1	1	100	1	2	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi						1	1	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi			1	1	100	1	2	
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi			20	20	100	15	35	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>								0	

	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>								0	
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal						1	1	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>								0	

	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								0	
	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota						1	1	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun dalam renstra tahun 2020-2024. Dalam penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat tiga indikator yang yang tertuang yaitu;

1. Indeks Pemberdayaan Gender;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;
3. Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak.

Di tahun 2023 dan tahun 2024, dari tiga indikator yang ada hanya dua indikator yang sudah mencapai target. dua diantaranya belum mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan minimnya anggaran untuk pencapaian target tersebut. pencapaian target-target tersebut dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku Utara**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indeks Pemberdayaan Gender			76,1	78,1	80	81	80,01	80,01	82	83	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			46,87	52,48	54,98	56,48	54,98	53,74	57,2	58,48	
3	Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak			60	80	100	40	30	30	50	60	

Berikut adalah data capaian kinerja pelayanan berdasarkan kabupaten kota tahun 2020-2024:

### **Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks yang mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, terutam dalam posisi pengambilan keputusan, serta akses terhadap sumber daya dan pendapatan. Semakin tinggi nilai Indeks Pemberdayaan Gender, maka semakin tinggi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang dicapai di suatu wilayah atau negara.

Komponen utama untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender adalah, peran ekonomi, peran politik dan pengambilan keputusan. Untuk mencapai Indeks Pemberdayaan Gender ada beberapa faktor pendukung dan Penghambat yang perlu diperhatikan yaitu:

#### **Faktor Pendukung:**

1. Penyediaan data mengenai isu gender menjadi dasar penting untuk merencanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan gender secara efektif;
2. Dibutuhkan dukungan kebijakan dan komitmen anggaran untuk melaksanakan program pemberdayaan gender;
3. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program;
4. Memberikan fasilitas kesehatan yang baik kepada perempuan.

#### **Faktor Penghambat:**

1. Masih kurangnya Kualitas SDM yang menangani pemberdayaan perempuan;
2. Budaya patriarki masih membebani peran ganda pada perempuan, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam sektor ekonomi dan politik;
3. Tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah, sehingga menghambat akses mereka ke pekerjaan formal yang berpenghasilan tinggi.

Berikut adalah capaian Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2024.

**Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024**

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kab/Kota					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	66,22	72,36	72,38	70,31	73,55	63,53
Halmahera Tengah	52,2	51,69	51,7	58,34	53,32	54,58
Kepulauan Sula	49,87	45,05	44,68	45,63	44,91	62,58
Halmahera Selatan	47,3	47,29	47,19	46,38	47,19	53,87
Halmahera Utara	66,3	66,53	66,1	65,5	68,4	76,99
Halmahera Timur	50,74	50,84	51,32	50,2	50,05	50,49
Pulau Morotai	55,77	55,71	54,41	53,75	54,56	60,7
Pulau Taliabu	56,73	57,69	58,33	57,14	58,6	57,46
Ternate	74,9	74,96	75,08	74,25	74,45	78,02
Tidore Kepulauan	67,52	67,01	67,32	68,23	67,74	71,54
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>77,5</b>	<b>77,28</b>	<b>78,59</b>	<b>78,99</b>	<b>79,05</b>	<b>80,08</b>

**Partisipasi dan Kesempatan Kerja Perempuan**

Angkatan kerja perempuan Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 54.98 persen, meningkat 7.19 persen poin dari tahun 2019 sebesar 47.79 persen. Sedangkan data tahun 2025 sampai bulan Februari TPAK Perempuan menurun diangka 53,74 %, ini terjadi karena terjadinya kenaikan signifikan di tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) angkatan kerja perempuan pada 2024 sebesar 4.3 persen juga mengalami penurunan dibanding tahun 2019, yaitu sebesar 4.8 persen. Perkembangan TPAK dan TPT perempuan Maluku Utara tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel Error! No text of specified style in document..20. Perkembangan TPAK Perempuan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 – 2024**

WILAYAH	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Halmahera Barat	45,23	46,08	46,25	57,06	52,73	56,71
Halmahera Tengah	44,67	50,52	42,88	54,10	54,59	49,51
Kepulauan Sula	50,01	38,87	47,83	35,54	42,86	46,46
Halmahera Selatan	53,10	51,13	52,24	47,72	60,99	63,33
Halmahera Utara	40,39	44,00	47,67	50,32	55,23	59,19
Halmahera Timur	50,14	45,45	42,12	46,81	52,98	50,93
Pulau Morotai	54,06	48,87	51,89	48,26	49,71	51,33
Pulau Taliabu	59,25	54,12	49,83	36,77	37,47	48,02
Ternate	44,43	43,22	43,88	42,16	47,25	51,59
Tidore Kepulauan	48,91	51,35	51,04	49,78	54,80	53,14
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>47,79</b>	<b>46,57</b>	<b>47,57</b>	<b>46,87</b>	<b>52,48</b>	<b>54,98</b>

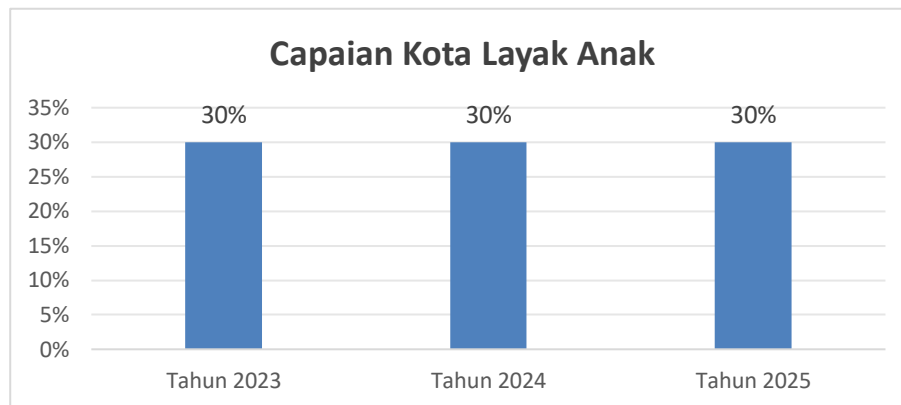
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel Perkembangan TPAK Perempuan Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 – 2024 sebesar 47,79 persen dari tahun 2019, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kontribusi terhadap peningkatan TPAK di Maluku Utara, yaitu :

1. Perempuan Maluku Utara Mempunyai kesadaran akan pentingnya bekerja
2. Potensi Sumber Daya Alam di Maluku Utara potensinya sangat besar, sehingga beberapa sektor misalnya pertanian, kelautan, dan pariwisata sangat menjamin perbaikan ekonomi untuk perempuan bekerja disektor-sektor tersebut.
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Upah, peluang kerja yang lebih banyak untuk perempuan dapat meningkatkan perbaikan ekonomi serta tingkat upah yang menarik dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pekerja perempuan.
4. Faktor Pendidikan, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi peningkatan TPAK di Provinsi Maluku Utara, karena dengan pendidikan perempuan bisa bekerja di sektor-sektor yang sangat relevan dengan pendidikan yang dimiliki.

## Rasio Kabupaten/Kota Layak Anak.

Grafik.II.I Capaian Kota Layak Anak Tahun 2023-2025



Berdasarkan grafik capaian kabupaten kota layak anak, dapat dilihat bahwa capaian kabupaten kota dari tahun 2023 sampai tahun 2025 tidak mengalami kenaikan, tetapi ada perubahan daerah penerima predikat kota layak yang pada tahun sebelumnya ada tiga kabupaten kota yang dapat meraih kabupaten kota layak anak, yaitu: Kota Ternate, Kota Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat, sedangkan pada tahun 2025 tiga daerah penerima penghargaan yaitu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur. Faktor yang mempengaruhi capaian kabupaten kota layak anak (KLA) adalah sebagai berikut:

### Faktor Pendukung:

- Komitmen dari pemerintah daerah, aparat tingkat desa/RT/RW, serta masyarakat untuk menjalankan program;
- Partisipasi masyarakat, termasuk dunia usaha dan media dalam mendukung hak anak;
- Pembentukan kelembagaan dan forum anak yang aktif ditingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
- Struktur birokrasi yang optimal dan ketersediaan sumber daya anggaran dan Fasilitas;

### Faktor Penghambat:

- Kurangnya koordinasi antar lembaga atau antar pemerintah dengan masyarakat dan anak;
- Keterbatasan Sumber Daya anggaran, fasilitas, atau infrastruktur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan anak;
- Kurangnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan;
- Masalah seperti kekerasan terhadap anak, perdagangan anak dan eksploitasi yang masih tinggi dapat menjadi penghambat utama

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berdasarkan pentahapan renstra tentang rencana strategis tahap pertama tahun 2026, maka secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber daya manusia yang berkualitas belum terpenuhi;
2. Kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan, yang mengakibatkan perempuan masih menghadapi diskriminasi;
3. masih minimnya pemenuhan hak-hak anak;
4. Peningkatan kasus kekerasan perempuan dan anak.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dalam penyusunan RKPD awal ada beberapa program dan kegiatan yang perlu ditambahkan untuk mendukung target capaian yang telah di targetkan, ini muncul karena adanya usulan- usulan dari masyarakat melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kota. Ini tergambar sesuai dengan table sebagai berikut:

Tabel TC.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Provinsi Maluku Utara

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-	-				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	420.000.000,00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	170.000.000,00			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		177,509,550	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	76,618,620	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	150.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	200,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5.332.151.622,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5,422,430,438	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	528,596,000	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	400.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	74,684,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	100.000.000,00					200,000,950	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	300,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	150.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	374,465,600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,506,181,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	180.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	280,944,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	261,800,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	257,020,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	167,480,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					

	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	200.000.000,00						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	126,419,250	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	200.000.000,00						
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	40 Orang	150.000.000,00	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	40 Orang	114,765,450	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi					
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	40 Orang	200.000.000,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	40 Orang	242,320,650	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20 Lembaga	150.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20 Lembaga	387,684,350	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	10 Lembaga	150.000.000,00						
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	50 Orang	250.000.000,00						
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	5 Unit	200.000.000,00						
3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>					
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	25 Perangkat Daerah	150.000.000,00						

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang	150.000.000,00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang	196,956,500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50 Layanan	150.000.000,00					1,061,098,600	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	120,154,950	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	88,399,600	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	20 Orang	150.000.000,00						
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	140,832,250	

4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	\				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	200.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25 Perangkat Daerah	260,213,850	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	150.000.000,00						
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1,270,210,100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	200.000.000,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga	332,192,100	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1 Orang	200.000.000,00						
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00						

	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	30 Layanan	200.000.000,00						
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		-	-	300.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			-		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi					
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	105,194,250	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00						
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	151,671,750	

	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	10 perangkat daerah	150.000.000,00						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi					
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	50 Orang	150.000.000,00	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	50 Orang	278,158,700	
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	150.000.000,00	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	200,288,820	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	150.000.000,00	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	232,000,000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	126,792,400	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		130,000,000	

	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	30 Orang	150.000.000,00						
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	150.000.000,00						
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	2 Kebijakan		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat Provinsi	2 Kebijakan	90,718,620	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	10 Orang	150.000.000,00						
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	10 Layanan	150.000.000,00					168,599,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	161,512,450	

	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	150.000.000,00	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	190,339,250	
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	10 Lembaga	150.000.000,00						
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	300,000,150	
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	15 Orang	100.000.000,00	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	15 Orang	265,195,050	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	20 Orang	200.000.000,00						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					400.000.000,00						
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00						
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					

	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	250,000,000	
	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	100.000.000,00						
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	100.000.000,00	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Daerah	149,833,450	
					<b>15.432.151.622,00</b>					<b>18,119,281,698</b>	

## 6.1 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Prioritas

Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Maluku Utara adalah program strategis untuk memberdayakan perempuan agar berdaya secara sosial, politik, serta memberikan perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat yang lebih aman serta adil. program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pemenuhan Hak Anak;
4. Program Perlindungan Khusus Anak;

**TABEL TC.32 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS  
Pembangunan Daerah  
Pemerintah Provinsi Maluku Utara**

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
<b>2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02.1.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0010 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
			2.08.02.1.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	2.08.03.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.01.0003 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.01.0004 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	
			2.08.03.1.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.02.0005 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.1.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.01.0006 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	

			2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.02.0009 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
			2.08.06.1.02.0010 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
4.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya Perlindungan Anak	2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.1.01.0006 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
			2.08.07.1.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	
			2.08.07.1.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.08.07.1.02.0008 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.1.02.0010 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

## **Bab III**

### **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

#### **3.1 Telahan terhadap kebijakan nasional**

Ruang bersama Indonesia (RBI) adalah program prioritas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman, inklusif dan suportif untuk perempuan, aman lansia serta penyandang disabilitas. Program ini berupa gerakan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa. RBI menyediakan fasilitas dan kegiatan, seperti permainan tradisional berbasis kearifan lokal, untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai, serta menjadi wadah bagi ibu hamil, ibu menyusui dan lansia untuk mendapatkan bantuan

Tujuan utama Ruang bersama Indonesia (RBI) Yaitu:

1. Melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta menyediakan ruang untuk berkontribusi pada pembangunan nasional;
2. Membina keluarga berkualitas dan mendukung anak-anak agar berprestasi melalui kolaborasi antar-kementerian seperti BKKBN dan pusat layanan UMKM;
3. Mengurangi ketergantungan anak pada gawai dan meningkatkan sosialisasi melalui permainan tradisional dan kegiatan edukatif lainnya;
4. memberikan pelatihan, bantuan permodalan, dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha mereka.

Fungsi dan Kegiatan Ruang Bersama Indonesia Yaitu:

1. Wadah Kolaborasi: mengintegrasikan berbagai program dan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Fasilitas dan Kegiatan Inklusif: menyediakan fasilitas, seperti ruang bermain, untuk berbagi kelompok usia;
3. Edukasi dan Literasi: mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan dan memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal;
4. Penguatan Ekonomi: Memberikan dukungan kepada perempuan untuk membangun ekonomi keluarga.

sasaran dari Program Ruang Bersama Indonesia ini yaitu;

1. Memperkuat pemahaman dan kesadaran di lingkungan keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
2. Meningkatkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak
3. Meningkatkan keterlibatan perempuan dan diakomodasinya pandangan anak dalam pengambilan keputusan dan struktur organisasi pemerintah desa dan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan kasus-kasus ketidakadilan gender dan pemenuhan hak anak di tingkat desa/kelurahan;
5. Melahirkan berbagai peraturan dan kebijakan berperspektif kesetaraan gender dan menghormati hak anak;
6. Membangun gerakan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendorong gerakan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### 3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan sasaran yang ada di Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara yaitu “Mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak yang setara adil dan inklusif”, maka dijabarkanlah kedalam tujuan-tujuan RENJA tahun 2026 sebagai berikut: Tujuan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 ini untuk menjabarkan program dan kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD (renja kerja pembangunan daerah) dan Renstra ( Rencana Straategis) tahun 2025-2029, sehingga menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan yang sistematis, terukur dan terkoordinasi dengan. Renja juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan anggaran, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan kinerja untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan, tujuan- tujuan utama renja dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Menjadi pedoman atau acuan resmi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2026;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan target dan sasaran pembangunan yang lebih besar , serta memastikan sinergi antar perangkat daerah.
3. Menjadi landasan formal untuk penyusunan dokumen renja kerja dan anggaran (RKA) dan memastikan penggunaan dana yang efisien;
4. Mempermudah proses pengawasan kegiatan pembangunan, baik dari sisi kinerja maupun keuangan;
5. Memastikan kelangsungan program dan kegiatan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan visi serta misi gubernur dan wakil gubernur.

Sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yaitu;

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk meningkatkan pelayanan perempuan dan anak berbasis gender;
2. Penyusunan regulasi tentang Perempuan dan Anak;
3. Penguatan Kelembagaan PUG, KLA;
4. Peningkatan layanan Unit korban terpadu;
5. Peningkatan pemberdayaan perempuan
6. Menurunkan angka kekerasan Perempuan dan Anak;
7. penguatan Kota layak anak.

Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran renja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka diperlukan program untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program perlindungan perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program pengelolaan system data gender dan anak;
5. Program pemenuhan hak anak (PHA);
6. Program perlindungan khusus anak.

Tabel TC.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional		Daerah	Target	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						14.866.067.000,00							22.650.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.866.067.000,00							22.650.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14.866.067.000,00							22.650.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						5.120.190.000,00							11.000.000.000,00	
[ Meningkatkan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi]	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85	70	75	78	5.120.190.000,00							11.000.000.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan														
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1 Berita Acara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Fasilitas Kunjungan Tamu													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
-	-	-	-	-	-	5.120.190.000,00						11.000.000.000,00	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
[ Meningkatkan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ]	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	85	70	75	78	5.120.190.000,00							11.000.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				3 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	1.545.877.000,00						-		2.800.000.000,00	
[ Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ]															
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-			-	500.000.000,00				-				900.000.000,00	
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi															
	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				1 Kebijakan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-					250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi														
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi				1 laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														
	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bintek				0 orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi														
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	-	-				545.877.000,00			-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	-	850.000.000,00	
Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi				1 Lembaga	145.877.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi														
jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														

	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				1 laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi													
	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi													
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-		-	500.000.000,00			-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	-	1.050.000.000,00	

monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				1 laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi														
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek				1 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				1 dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penganggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi														
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penganggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					10 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													
[ Meningkatkan Perlindungan Perempuan ]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	95	100	80	80	2.400.000.000,00						2.700.000.000,00	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIP Kewenangan Provinsi													

Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KIP Kewenangan Provinsi														
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIP Kewenangan Provinsi														
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Provinsi			1 laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan kebijakan pencegahan KIP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi														

	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				1 Kebijakan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				1 Kegiatan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota															

	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													

	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														
penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi														
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi				1 Laporan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penganggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi														
Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi														

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	2.050.000.000,00						-	2.050.000.000,00	
[ Meningkatnya Kualitas Keluarga ]													
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-	-	700.000.000,00							700.000.000,00	
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													
Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota													

Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-				750.000.000,00							750.000.000,00	
monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia				10 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi									dan penanggulangan kemiskinan				PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-				600.000.000,00				1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	-	600.000.000,00	

layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

	konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									penanggulangan kemiskinan				PERLINDUNGAN ANAK
Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
[ Meningkatkan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak ]	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	20	2	5	7	350.000.000,00							350.000.000,00	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-				350.000.000,00				1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	-	350.000.000,00	
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA														
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam pemveliaan data gender dan anak														

Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi														
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	1.650.000.000,00						-		1.850.000.000,00
[ Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak ]														
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-			-	950.000.000,00			-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	-		1.000.000.000,00
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi														

	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi				1 Kebijakan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi													
	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi													
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi													
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi													
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-	-		-	700.000.000,00			-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan	-	-	850.000.000,00	

										penanggulangan kemiskinan				
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak														
	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				1 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi														
	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				10 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek				50 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan				10 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
[ Meningkatnya Perlindungan Anak ]	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	95	100	80	80	1.750.000.000,00						1.900.000.000,00	
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KTA Kewenangan Provinsi													

	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi				50 Orang	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi														
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				10 Lembaga	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi														
	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi				1 Kebijakan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana kerja tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan berhasil dilaksanakan.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 ini. Diharapkan penyusunan rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Sofri, 18 November 2025  
Kepala DP3A  
Provinsi Maluku Utara,  
  
Dra. Hairiah, M.Si  
NIP: 196707081993032012